

Muslim, Pembangunan, dan Informasi

Nasrullah Nazsir

Pendekatan pembangunan, harus berorientasi kebutuhan. Pandangan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang pada umumnya, dan negeri-negeri Muslim khususnya, tentang diri mereka sendiri dan negara-negara industri. Pada tahap tertentu, pandangan ini merupakan suatu warisan kolonialisme. Namun, hal ini juga merupakan hasil pola-pola pembangunan konvensional yang telah dilakukan masyarakat di negara berkembang. Analisis, atas peranan informasi ini, harus dikembangkan dengan suatu pendekatan yang kritis dan seimbang. Akhirnya, hanya dengan mengembangkan teknologi-teknologi informasi yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan dan kriteria nilai yang khas-lah, negeri-negeri Muslim akan dapat bertahan dengan integritas dan kemandiriannya di abad informasi.

1. Pendahuluan

Konsep pembangunan berkaitan langsung dengan integritas dan kelangsungan hidup dunia Muslim. Dalam abad Informasi, semua negeri Muslim berupaya “membangun” kesejajaran dengan negara-negara Utara yang “maju”; menjawab keterbelakangan, kebergantungan teknologis, dan kesinambungan warisan kolonialisme. Karena negeri-negeri Muslim merdeka pada akhir tahun empat puluhan dan awal lima puluhan, mereka mengikuti pola strategi pembangunan yang hendak mengubah masyarakat “zaman pertengahan” dan “tradisional” menjadi masyarakat-masyarakat modern.

Pembangunan dipandang sama dengan modernisasi, “Poses suatu masyarakat untuk bisa dicirikan dengan suatu kepercayaan kepada kontrol rasional dan ilmiah atas fisik dan lingkungan sosial manusia dan penerapan teknologi untuk maksud itu” (Kautsky dan Wiley, 1972: 20). Karena itu, asumsi teknologi linier dipakai sebagaimana bangsa-bangsa industri mempergunakannya; berikut membawa implikasi permasalahan, seperti kekerasan, kenakalan remaja, penyakit jiwa, dan lain-lain, sebagai biaya-biaya modernisasi (Weiner, 1960).

Namun demikian, pemunculan kaum environmentalis dan ekologi, menantang anggapan

keunggulan normatif modernitas atas tradisionalitas. Kaum ekologi membela kultur-kultur tradisional, dan menunjukkan efek samping modernisme yang merusak dan mengganggu. Argumen-argumen itu menantang “kontrol rasional dan ilmiah atas fisik dan lingkungan sosial manusia dan penerapan teknologi untuk maksud itu”. Sains dan teknologi dikritik lantaran efeknya yang merugikan masyarakat dan lingkungan (Mc Millan, 1974).

Pembangunan menjadi dikaitkan dengan perlindungan dan perhatian terhadap lingkungan. Konferensi PBB, mengenai Lingkungan Manusia, pada Juni 1972, di Stockholm, merupakan mata rantai pertama dari upaya memperluas konsep pembangunan. Pemunculan OPEC, serta India dan Brasil, sebagai kekuatan teknologi, menghancurkan konvensi tentang negara maju dan berkembang; kepada pembedaan antara negara kaya modal dan negara-negara berkembang miskin modal, maupun antara negara maju dan kurang maju (Mc Millan, 1980).

Akhir dekade ini, konsep modernis tentang pembangunan ditolak, seperti konsep Lerner dan Rostow, mengenai indikator urbanisasi, konsumsi umum, tingkat buta huruf; atau pelbagai gagasan seperti “lepas landas”, “tingkat-tingkat

pertumbuhan”, “*trickle down theory*” (teori menetes ke bawah), dan penindasan atas masyarakat tradisional (Lerner, 1958).

Sekarang, pembangunan menjadi dikaitkan dengan seluruh gagasan. Sumbangan Konferensi Pugwash, mengenai Sains dan Teknologi untuk Pembangunan, di Wina, Agustus 1979, mencela gagasan alih teknologi dan *trickle down effect*, dan menyarankan pertimbangan:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya memandu ke pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan umum yang melibatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia (terutama pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai), khususnya penduduk yang tingkat sosial dan ekonominya paling rendah.

2. Pembangunan yang berarti mencakup partisipasi masyarakat sendiri dalam menciptakan perubahan ekonomi dan sosial.

3. Karena pembangunan bukanlah suatu proses yang secara historis linier, maka ia tak boleh semata-mata terdiri atas peniruan terhadap struktur dan kebijaksanaan negara-negara maju. Terdapat banyak jalan yang bisa ditempuh bagi pembangunan, yang mencakup jalan kapitalis, sosialis dan “jalan ketiga” yang khas. Penting untuk ditegaskan bahwa jalan yang dipilih harus sesuai dengan warisan kultural dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan.

4. Proses-proses industrialisasi di negara-negara berkembang tidak boleh semata-mata mencangkok aktivitas-aktivitas industrial tertentu dari negara-negara maju, baik untuk mengeksploitasi mineral, memproduksi barang-barang untuk diekspor. Industrialisasi harus disertai dengan penguasaan atas teknologi-teknologi yang berkaitan.

5. Semata-mata alih teknologi tidaklah cukup. Meski teknologi dapat diperoleh secara bebas, namun suatu bangsa belum dapat membangun selama bangsa itu belum memiliki suatu infrastruktur sains dan teknologi yang berupa tenaga manusia, ilmu pengetahuan, keahlian dan kemampuan-kemampuan inovatif, dan produktif untuk menyerap dan mengadaptasi

teknologi yang diimpor. Karena itu, negara-negara berkembang harus mandiri, baik secara individual maupun secara kolektif agar sedikitnya sumber daya sains dan teknologi mereka bisa disatupadukan sedemikian, sehingga memberikan hasil yang maksimum.

6. Dua tipe sains tidak akan dapat dimiliki sekaligus, yaitu tipe yang pertama untuk negara-negara berkembang, dan tipe yang kedua untuk negara-negara maju. Negara-negara berkembang tidak boleh merasa puas dengan kultur sains yang berasal dari negara-negara maju. Karena itu, bagi negara-negara berkembang dan maju, kemampuan nasional untuk riset dasar adalah penting, meskipun masalah-masalah yang dihadapi dan kriteria pemilihan akan sering berbeda.

Konsep strategi pembangunan, dan analisisnya, berkembang lebih jauh. Konferensi PBB, mengenai sumber-sumber energi “baru dan dapat digunakan terus menerus”, di Nairobi, Agustus 1981, menekankan pemanfaatan seperti matahari, angin dan biomass, dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat pedesaan (khususnya, pemasokan kayu bakar) sebagai strategi pembangunan yang sehat. Kongres dunia Pertama mengenai Pembangunan, oleh Asosiasi Studi Prospek Sosial Dunia, di Dakar, Januari 1981, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pokok, pembangunan pedesaan, dan pemenuhan martabat melalui kerja dan pekerjaan, sebagai kriteria penting.

Definisi-definisi dan strategi-strategi pembangunan sekarang menjadi bermacam-macam dan banyak. Studi OECD, yang mendefinisikan kembali pembangunan, menyimpulkan pertanyaan “apa pembangunan itu?” sama dengan menjawab pertanyaan “apa manusia itu?”. Studi itu menyimpulkan :

“Konstelasi menyeluruh praktek dan ideologi ekonomi, politik, sosial, hukum, pendidikan, dan praktek-praktek serta ideologi-ideologi lain, disebarkan di seputar konsep dan gagasan pembangunan. Perwujudan semua itu, sebenarnya mengungkapkan makna yang tak lengkap dari istilah itu. Sebab itu, definisi pembangunan manapun mencakup definisi wilayah masalah yang

di dalamnya dan sejumlah besar pertanyaan harus diajukan. Teori ekonomi yang dianut, membentuk wacana tentang pembangunan dan mengungkapkan makna implisitnya. Tetapi, pada gilirannya tugas-tugas historis ini mencerminkan gambaran tentang dunia dan peranan umat manusia di dunia. Makna pembangunan terdefiniskan oleh makna yang diberikan oleh manusia kepada seluruh eksistensi sosialnya melalui ekonomi dan politik (Birou, 1977: 330).

Pada tahun delapan puluhan awal, terjadi lagi perkembangan. Muncul gagasan tentang kesalingbergantungan. Para pemimpin negara industri berbicara kesalingbergantungan Utara dan Selatan. Pembangunan di Selatan mesti tertuju pada kelangsungan hidup negara-negara berkembang, dan kelangsungan hidup Utara. Walaupun gagasan kesalingbergantungan ekologis relatif baru, dalam bentuk ekonomisnya kesalingbergantungan merupakan gagasan lama. Laporan Pearson, "*Partners in development*", memberikan tinjauan pertama atas dua puluh tahun pembangunan ekonomi. Dua laporan dari komisi Brandt, "*North South : A Strategy for Survival*" dan "*Comdan Common Cause*," memperbaharui konsep itu (Pan Books, 1983).

Secara ekonomi, Utara selalu bergantung pada Selatan, dalam sumber bahan mentah maupun pasar produk dan teknologinya. Namun, gagasan kesalingbergantungan mengedepankan dimensi baru: argumen untuk mempertahankan *status quo* dan merongrong tuntutan Dunia Ketiga akan tatanan ekonomi baru. "Kita semua berada dalam satu perahu", ujar argumen itu, "Jika Anda guncangkan perahu ini, maka akan tengelamlah kita semua". Strategi kesalingbergantungan, yang mempertahankan suprastruktur ekonomi, politik, dan teknologi global, yang tidak adil, berupaya diperbaharui.

Struktur ekonomi dan teknologi mengerangka seakan negara berkembang sebagai koloni negara industri. Sekitar 90% ilmuwan ada di negara-negara maju, dan teknologi merupakan salah satu ekspor utama mereka. Bank dan perusahaan asuransi, perusahaan penerbangan dan perkapalan, negara maju menguasai dunia.

Jaringan ekonomi ini dibuat pada akhir Perang

Dunia (PD) II, oleh konferensi Bretton Woods, di Bretton Woods, Amerika Serikat. Maka, didirikanlah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Pada saat itu, negara-negara Dunia Ketiga masih dijajah. Peranan mereka, dalam sistem moneter dan teknologi dunia, mencerminkan status di bawah negara maju. Mereka tidak ikut persetujuan Bretton Woods. Melihat jajahan akan hilang, negara-negara Barat membuat rencana konstitusional kesinambungan dominasi dan pengeksploitasian atas negara-negara baru merdeka. Semenjak itu, terjadi beberapa modifikasi kecil, tetapi, pada hakikatnya, sistem ekonomi dunia masih sama mencerminkan dunia tahun 1940-an dan 1950-an. Gagasan "pembangunan melalui kesalingbergantungan" melestarikan struktur ini. Kesalingbergantungan menjadi kebergantungan ekonomi dunia, ditentukan kekuatan pengendali pasar dunia teknologi maju dan sarana produksi (*New Scientist*, 1981).

Seminar "Dunia Ketiga: Pembangunan atau Krisisnya", di Penang, November 1984, melukiskannya. Lebih seratus pemikir, penulis, dan aktivis Dunia Ketiga, menggambarkan problematika pembangunan dengan kata-kata berikut :

"Meskipun kebanyakan negara Dunia Ketiga telah memperoleh kemerdekaan politik, namun dalam banyak hal kita lebih dikendalikan oleh para tuan penjajah kita dahulu dan negara-negara industri. Hal ini terjadi dalam bidang ekonomi, masalah-masalah sosial dan kebudayaan".

"Dalam bidang ekonomi, negara-negara Dunia Ketiga menjadi, bahkan, lebih bergantung pada negara-negara kaya dalam periode pasca PD II. Negara-negara Dunia Ketiga lebih terjebak ke dalam pasar dunia, dengan lebih banyak sumber daya dan tenaga kerja kita digunakan untuk memproduksi barang-barang untuk diekspor ke negara-negara kaya. Namun, persyaratan-persyaratan perdagangan yang diajukan negara-negara Dunia Ketiga secara umum telah memburuk *vis-a-vis* negara-negara industri, sehingga menyebabkan beratus-ratus milyar dolar sumber daya riil teralihkan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya".

"Di Dunia Ketiga, tanah-tanah berkualitas

terbaik ditanami tetanaman pertanian untuk diekspor ke negara-negara kaya. Sumber-sumber daya hutan, mineral, dan logam kita yang sangat kaya, diekspor ke negara-negara kaya. Otak terbaik dan sejumlah sangat besar tenaga kerja kita digunakan untuk melayani korporasi-korporasi transnasional yang dimiliki oleh negara-negara kaya. Hampir semua barang dagangan kita diangkut dengan kapal-kapal milik negara-negara kaya. Seluruh pedagang besar dan kecil komoditi di dunia, dikendalikan oleh negara-negara kaya ini. Dan akhirnya, para periset puncak kita menghabiskan berjam-jam melakukan riset untuk lembaga-lembaga yang pada akhirnya dikendalikan oleh pemerintah negara-negara kaya; dan sejumlah besar akademisi, dokter, dan ilmuwan, bermigrasi ke negara-negara kaya untuk mendapatkan padang rumput yang lebih hijau”.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyedotan terus-menerus uang dan sumber kekayaan Dunia Ketiga. Dalam era kolonial, kekayaan daerah jajahan dimanfaatkan untuk membangun negara penjajah. Situasi ini telah semakin buruk. “Bantuan pembangunan” hanyalah mitos negara industri, untuk keuntungan investasi mereka, bunga pinjaman Dunia Ketiga, bunga atas utang-utang, royalti teknologi, ongkos manajemen dan konsultasi, kerugian merosotnya nilai tukar, dan hilangnya pemasukan pajak akibat korporasi transnasional. Selanjutnya, Deklarasi itu mengatakan :

“Dalam bidang sosial dan kultural, pengendalian negara-negara industri atas Dunia Ketiga dapat dikatakan, bahkan, lebih besar. Negara-negara Dunia Ketiga, secara sadar atau tidak sadar telah mengimpor model-model pendidikan, komunikasi, struktur kognitif, sistem-sistem perawatan kesehatan, perencanaan penduduk, koperasi, perumahan, dan transportasi dari negara-negara industri. Kebanyakan model ini benar-benar tidak sesuai dan tidak layak untuk memecahkan masalah-masalah mendasar dan kebutuhan-kebutuhan mayoritas rakyat di Dunia Ketiga. Tetapi, model-model ini malah, terutama, bermanfaat bagi sekelompok kaum elite. Dengan demikian sejumlah sangat besar “keberhasilan”

pertumbuhan ekonomi di Dunia Ketiga mengalir ke minoritas kecil ini”.

Wanita juga dieksploitasi di Dunia Ketiga. Mereka mengalami penindasan sosial dan kultural dari kaum laki-laki. Posisi wanita, di Dunia Ketiga, belum menjadi lebih baik. Keadaan mereka malah semakin buruk ketika modernisasi di daerah pedesaan menggantikan tenaga wanita.

Bahkan, benak rakyat dipengaruhi komunikasi massa, dan industri mode, negara-negara industri. Dunia Ketiga dibanjiri program televisi, film, video, *cassette*, buku, dan majalah, mereka. Hal itu, tentu saja, mengganggu kultur dan cara hidup rakyat Dunia Ketiga. Asosiasi konsumen itu mendapati negara Adidaya sering mencegah upaya Dunia Ketiga untuk meringankan beban hidupnya ;

“Dan ketika rakyat Dunia Ketiga berupaya melepaskan diri dari belenggu ekonomi dan sosial yang membuatnya terikat kepada bangsa-bangsa industri, mereka sering menghalanginya. Misalnya, ketika baru-baru ini Bangladesh memutuskan untuk melarang beratus-ratus obat berbahaya atau tidak bernilai, pemerintah Amerika Serikat turun tangan atas nama industri obat. Dan ketika negara-negara Dunia Ketiga tidak menganut kebijaksanaan yang sesuai dengan negara-negara besar, maka mereka diancam dengan serbuan. Hal ini tampak ketika Amerika Serikat menyerbu Granada, dan Rusia menyerbu Afganistan. Atau ketika organisasi-organisasi internasional seperti UNESCO, ILO, atau UNCTAD, hendak mengangkat masalah-masalah atas nama Dunia Ketiga, maka mereka pun mendapatkan ancaman berupa ditariknya dana-dana yang diberikan kepada mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat”.

Strategi pembangunan harus mendobrak struktur global, dan memecahkan masalah-masalah ini. Kezaliman dan eksploitasi, bukan saja merupakan bagian dari sistem, tetapi merupakan sistem itu sendiri. Negara-negara berkembang tidak akan merdeka selama menjadi bagian dan paket teori, gagasan, strategi, rancangan kekuatan luar. Gagasan, maupun strategi pembangunan, haruslah muncul dari dalam Dunia Ketiga sendiri.

2. Pembangunan Suatu Paradigma Baru

Ilmu pengetahuan yang diperoleh berkat debat, diskusi, dan pengalaman praktis, selama lebih tiga dekade memperkuat kesimpulan bahwa :

1. Teori-teori dan resep lama pembangunan yang disumbangkan oleh para ekonom, termasuk ekonomi Dunia Ketiga, dan yang diimplementasikan oleh para perencana, telah gagal secara menyedihkan, dan kini tidak memiliki kredibilitas.

2. Terdapat banyak model pembangunan dan jalan yang dianut oleh negara-negara industri tidak sesuai untuk Dunia Ketiga, dan masing-masing negara itu harus menentukan pilihannya sendiri dengan menciptakan pendekatannya sendiri terhadap pembangunan.

3. Sistem-sistem tradisional sama sekali tidak kalah bila dibandingkan dengan sistem-sistem modern, dan dalam tradisi dan kultur merekalah terdapat pemecahan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

4. Masalah-masalah pembangunan pada

hakikatnya saling berkaitan dan tidak dapat dipecahkan secara sendiri-sendiri.

5. Struktur-struktur global yang zalim dan dominan itu dapat dihancurkan hanya jika negara-negara Dunia Ketiga meningkatkan kebertumpuan pada diri sendiri dan mengembangkan strategi-strategi kooperatif antarmereka.

6. Struktur-struktur intern negara-negara berkembang, sama eksploitatifnya dengan struktur-struktur global dan harus dihancurkan jika saja sasaran –sasaran tercerahkan hendak dicapai.

Kesimpulan ini telah menimbulkan pengertian baru, atau paradigma baru, tentang pembangunan. Paradigma baru ini, berupaya memecahkan permasalahan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, kemandirian, keadilan sosial, melalui pembangunan masyarakat, dan keotentikan kultural, yang menjaga dan memajukan tradisi, kultur dan, nilai-nilai mereka. Tabel 1, meringkaskan alternatif baru itu, dan mengidentifikasi beberapa faktor yang memandu ke paradigma itu. (Oakly dan Marsden, 1984).

Tabel 1.

Alternatif-Alternatif yang Muncul terhadap Paradigma-Paradigma Pembangunan yang Dominan.

Elemen-elemen Utama Paradigma yang Dominan	Alternatif-alternatif yang Muncul
1. Pertumbuhan Ekonomi Linier	1. Pendistribusian secara adil kekayaan keadilan sosial, pendekatan kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Alih teknologi berorientasi produksi padat modal	1. Penekanan pada teknologi madya padat karya 2. Integrasi sektor tradisional dan modern di sebuah negara 3. Perhatian terhadap kalitas kehidupan dan lingkungan 4. Perhatian terhadap pelestarian keotentikan kultural
3. Modernisasi	1. Penghormatan terhadap kultur dan tradisi 2. Keotentikan kultral
4. Perencanaan terpusat	1. Percaya diri dan penekanan pada kecukupan diri 2. Partisipasi masyarakat serta perencanaan dan pelaksanaan desentralisasi 3. Penekanan pada pembangunan masyarakat
5. Keterbelakangan akibat sebab-sebab internal	1. Sebab-sebab internal dan eksternal keterbelakangan 2. Prasangka intern terhadap Barat dan sistem ini

Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan munculnya paradigma-paradigma:

- (1) Tiga dekade pengalaman
- (2) Publikasi laporan-laporan Brandt
- (3) Kegagalan teori "*trickle-down*" untuk pendistribusian manfaat-manfaat pembangunan

- (1) Krisis lingkungan dan energi
- (2) Publikasi batas-batas pertumbuhan dan model-model dunia lainnya

- (1) Kegagalan modernisasi
- (2) Kesadaran kultural

- (1) Tiga dekade pengalaman pembangunan
- (2) Kesadaran kultural di beberapa negara berkembang

- (1) Kritik radikal atas paradigma yang dominan
- (2) Bangkitnya OPEC
- (3) Munculnya Kelompok 77
- (4) Perubahan kekuatan dunia, sebagaimana dilukiskan oleh perilaku pemberian suara di Majelis Umum PBB tentang "Pembangunan dalam Kerangka Islam" (Leicester 1979: 223-40).

Dalam paradigma baru, informasi mendapatkan nilai penting. Semua aktivitas sektoral (pertanian, industri, transportasi, pembaruan pedesaan) memerlukan informasi akurat dan tepat pada waktunya, untuk bisa mandiri. Aktivitas-aktivitas lain — untuk bisa mandiri seperti, sains dan teknologi (riset dan pengembangan), pendidikan, atau pemerintahan (perencanaan dan pembuatan keputusan) — tidak dapat dilakukan tanpa tersedianya informasi yang relevan. Lagi pula, gagasan-gagasan keadilan sosial dan pembangunan masyarakat benar-benar tidak akan berarti jika tidak ada arus bebas informasi relevan antarsemua lapisan masyarakat. Dengan demikian, informasi merupakan darah kehidupan gagasan baru dan sasaran-sasaran pembangunan itu.

Faktor-faktor penentu gagasan baru tentang pembangunan — yaitu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar melalui kemandirian, keadilan sosial dan keotentikan sosial — tidak dapat

disangkal lagi, sulit dilakukan. Kemandirian sudah umum dipahami. Apa arti suatu masyarakat atau bangsa dapat menentukan pembangunannya sendiri — berdasarkan sumber daya, potensi, kemampuan, dan "model"-nya sendiri, dalam situasi dominasi dan kebergantungan? Berbagai upaya mandiri selalu dihalangi, dan berbagai keputusan ditentukan kekuatan luar maupun elite lokal. Apa arti mandiri, bila berbagai solusi sudah dibuat, dan teknologi lebih cepat, efisien, andal, dalam memutuskan masalah? Bila suatu kultur mahal, tapi mengakibatkan orang terasing, malah membuat orang tertarik dan mendambakannya? Apa arti situasi ketika orang sedemikian tercerabut, hanya mampu bertumpu pada pengalaman penindasan dan eksploitasi? (Bogle-L'Overture, 1980).

Penting disadari, berbicara kemandirian, bukan saja terbatas pada satu negara berkembang, tetapi juga Dunia Ketiga. Dua atau lebih negara berkembang, yang sama tahap perkembangannya, dapat bekerjasama, saling mengisi kekurangan mereka, dan menjadi mandiri. Banyak negara berkembang sedemikian kecil sehingga tidak bisa mandiri tanpa kerjasama dengan negara tetangga. Secara total, negara-negara berkembang, umumnya, dan negara Muslim, khususnya, memiliki potensi untuk mandiri.

Strategi pembangunan, yang memaksimalkan kemandirian, menghasilkan komoditi-komoditi pokok yang dibutuhkan rakyatnya. Kemandirian mereduksi kebergantungan pada perdagangan luar negeri, pinjaman dan investasi asing, impor barang-barang mewah, dan mengakhiri alih teknologi besar-besaran. Penyediaan berbagai kebutuhan pokok rakyat, akhirnya, berkaitan dengan kebijaksanaan untuk mandiri. Industri lokal harus mampu memproduksi barang-barang konsumsi pokok.

Pada hakikatnya, kemandirian berkaitan dengan keadilan sosial. Sistem-sistem politik di banyak negara berkembang, hampir tidak mendistribusikan kekayaan secara adil hingga memungkinkan kaum miskin mencapai standar hidup minimum. Strategi untuk mandiri tidak ada artinya bila tidak ada partisipasi besar rakyat. Pemenuhan

kebutuhan pokok memerlukan partisipasi lembaga-lembaga lokal, maupun perubahan fundamental distribusi aset, seperti tanah dan *income (land-reform)* yang luas).

Partisipasi masyarakat, sebagai suatu proses, membuka jalan bagi orang untuk membangun dirinya, hidupnya, dan lingkungannya. Namun, orang tidak dapat membangun masyarakat mereka jika tidak memiliki kemampuan tertentu. Kaum miskin harus diberi otoritas, dan kesempatan yang layak. Karena itu, proyek-proyek perumahan mandiri (*self help*), dan gotong royong (*mutual help*), dengan tanah dan kapital yang memadai, merupakan kunci pembangunan yang bersifat mandiri. Kesehatan merupakan contoh lain. Di sini, partisipasi aktif masyarakat pedesaan sendiri mencapai hasil-hasil sangat memuaskan. Maka, partisipasi masyarakat merupakan proses pertanggungjawaban individu, keluarga, dan masyarakat, terhadap kesehatan dan kesejahteraannya sendiri; memberikan sumbangan kepada pembangunannya sendiri, dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, langsung berkenaan dengan redistribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Akhirnya, gagasan tentang keotentikan kultural, tidak saja berarti bahwa kultur-kultur tradisional, lingkungan, dan nilai-nilai, harus dihormati, tetapi juga sistem-sistem tradisional sebagai sumber kekuatan, dan pelbagai solusi masalah yang dihadapi masyarakat. *Pertama*, keotentikan kultural memerlukan penekanan atas berbagai kultur pedesaan, juga perlindungan atas kultur tradisional, dari serbuan pola konsumsi Barat dan barang-barang "kemahakuasaan" teknologi. Rasa hormat terhadap norma-norma, bahasa, keyakinan-keyakinan, kesusasteraan dan kesenian, serta *ke-prigel-an* masyarakat, adalah faktor-faktor yang membuat hidup masyarakat kaya dan bermakna. *Kedua*, sistem-sistem tradisional yang secara ekologis lebih sehat, dan berorientasi konservasi, harus dilindungi dan dibantu. Sistem pengobatan tradisional, misalnya, bila didukung, dikembangkan, dan dipadukan dengan sistem pengobatan modern, maka sistem kesehatan di Dunia Ketiga akan semakin meningkat mutunya.

Kebergantungan pada perusahaan farmasi pun akan tereduksi. Begitu pula, teknik-teknik perumahan tradisional, metode-metode perikanan, dan teknologi-teknologi lokal, harus menjadi komponen dasar pembangunan.

Hal-hal itu, sebagai dasar bagi pengertian baru tentang pembangunan. Kemandirian, keadilan sosial, dan keotentikan kultural, bukan saja merupakan gagasan-gagasan konseptual, tetapi juga memiliki implikasi-implikasi kebijaksanaan yang kuat dan spesifik. Dalam kerangka inilah, informasi memperoleh peranan sentral untuk pembangunan.

3. Ilmu Informasi dan Pembangunan Menuju Suatu Model

Hubungan antara informasi dan pembangunan merupakan wilayah ilmu yang paling sedikit dieksplorasi. Literatur tentang kebutuhan-kebutuhan informasi negara berkembang, masih tampak sebagai gagasan alih teknologi. Tell, misalnya, melukiskan "model baru" agar negara berkembang "mengkoordinasikan semua aktivitas" seperti dilakukan perpustakaan-perpustakaan, pusat-pusat arsip, dan dokumentasi, yang menggunakan teknologi komputer dan komunikasi, untuk fungsi intelijen, guna memajukan alih teknologi. (Tell, 1980). Woodward menyatakan, "Pembangunan melibatkan pengenalan dan adaptasi teknologi dan konsep-konsep yang dikembangkan di lain tempat". (Woodward, 1980). Sedangkan Salim, memandang ilmu informasi semata sebagai "alih teknologi dan sains antara negara-negara maju dan negara-negara terbelakang". (Salim, 1980).

Peranan perpustakaan di negara berkembang telah mendapatkan perhatian relatif lebih serius. Fungsi sosial perpustakaan memiliki peranan tertentu di negara-negara berkembang. Banyak penulis melihat perpustakaan sebagai lembaga sosial. Landheer, misalnya menganggap kelembagaan sosial perpustakaan akan berkembang bila dapat mendorong kesadaran dari tingkat individu sampai kolektif. Ia mengutip contoh-contoh dari sejarah Eropa dan

menyimpulkan:

“Perpustakaan merupakan hasil pertumbuhan suatu kesadaran kolektif yang pada gilirannya bersifat menstimulasi. Hal ini berarti bahwa perpustakaan suatu kelompok kultural tertentu dapat menjadi suatu faktor kian penting. Perpustakaan dapat berarti sebagai kekuatan yang dapat menghindarkan terjadinya perusakan atas pola kultur tanpa penggantian yang memadai. Jika suatu formasi kelompok adalah penting bagi formasi perpustakaan, maka kemungkinan-kemungkinan terbaiknya terletak dalam perhubungannya sendiri dengan kesadaran kelompok ini, bukannya dalam upaya mengubahnya. Kesadaran kelompok mendahului perpustakaan, dan perpustakaan tidak akan dapat menciptakannya” (Landheer, 1957, 212-13).

Bagi Landheer, perpustakaan merupakan suatu lembaga sosial yang pasif. Ia tidak menciptakan kesadaran kelompok, tetapi semata menjadi alat penyebarannya. Ia adalah alat ideologi dan untuk memajukan tujuannya sendiri.

“Jika kesadaran kelompok digambarkan, maka jelaslah mengapa abad ke-20 membawa ‘perpustakaan ideologis’. Abad ke-20, dikarenakan perubahan sosialnya yang cepat, memerlukan suatu penelaahan ulang atas semua nilai sosial, dan metode paling menentukan untuk mencapai hal ini ialah berupaya merekonstruksi kesadaran kelompok sosial secara langsung. Hal ini menyebabkan adanya upaya-upaya untuk menciptakan suatu mentalitas *communist*, suatu mentalitas yang dapat diimbangi oleh rekonstruksi semangat Barat. Pada gilirannya, hal ini memandu ke modernisasi mentalitas negara-negara Islam, ‘jalan ketiga’ India dan pola-pola ideologis yang muncul di bagian-bagian lain dunia. Perpustakaan komunis telah menjadi ciri baku blok Timur. Sementara, Barat, telah melihat kenaikan cukup besar publikasi-publikasi yang menganalisis pola-pola kulturalnya. Organisasi-organisasi regional, juga mendirikan perpustakaan-perpustakaan yang bercorak ideologis, meski banyak dari tugas-tugas mereka, bersifat teknik. Perpustakaan informasi pemerintah modern juga memiliki saran-saran ideologis, meski tujuannya mencakup banyak lagi

sasaran teknis”. (Landheer, 1957:214).

Tetapi, layakkah asumsi bahwa perpustakaan, dan jasa lain informasi, tidak lebih dari alat pasif propaganda ideologis? Dapatkah ia memiliki peranan sosial dan ideologis yang lebih dinamis? Benge mengatakan bahwa kandungan perpustakaanlah (sumber-sumber informasi yang dimilikinya), yang secara ideologis berat sebelah. Menurutnya, semua sumber referensi yang tercetak dalam bahasa Inggris, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial tertentu, dan khususnya, mereka yang dominan pada masa-masa tertentu. *The Oxford English Dictionary*, tepatnya, merupakan refleksi kekuatan imperial British, sebagaimana *Dictionary of National Biography*. Dalam semua hal, berbagai sumber informasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu (Benge, 1979: 192).

Benge, selanjutnya melihat bahwa penggunaan informasi yang terorganisir berkaitan dengan kelas-kelas menengah kota. Kebutuhan masyarakat tertentu akan informasi, tidak selalu dirasakan. “Inilah suatu masalah pembangunan, dan sesuatu yang harus dipahami oleh para pustakawan dan para petugas informasi, sebab bagian dari pekerjaan mereka ialah mengenali kebutuhan-kebutuhan dan menerjemahkannya ke dalam sistem-sistem sadar”.

Dengan demikian, Benge menempatkan tanggungjawab yang lebih dinamis di bahu para pustakawan dan ilmuwan informasi. Tanggungjawab mengenali kebutuhan-kebutuhan dan menerjemahkannya ke dalam sistem-sistem dasar, baik terorganisasi atau tidak. Hal ini merupakan elemen pokok dalam memahami peranan informasi dalam pembangunan. Para pustakawan dan ilmuwan informasi bisa menjadikan lembaga mereka sebagai alat membangkitkan kesadaran sosial dan perubahan sosial — bukannya semata memberikan reaksi terhadap perubahan, seperti dikemukakan Landheer. Umpan balik positif akan tercipta di antara perpustakaan dan pusat informasi lainnya, serta tingkat kesadaran sosial masyarakat.

Tidak seperti Landheer dan Benge, J.H.Shera, dalam karya klasiknya *The Sociological Founda-*

tion of Librarianship, memandang perpustakaan sebagai agen sosial, bukannya lembaga. (Shera, 1970). Fungsi pustakawan "bertindak sebagai perantara antara manusia dan catatan-catatan grafis, bukan saja buku, tetapi juga berupa rekaman suara, gambar, *audio-tape*, grafik dan peta, serta apapun yang memberikan andilnya bagi kemajuan pengetahuan manusia". (Shera, 1970).

Analisis Shera, meski jauh lebih lengkap, masih meniadakan aspek-aspek penting dari ilmu informasi. Perpustakaan, sebagai perlengkapan kultural masyarakat, memang memainkan peranan penting dalam pelestarian dan penguatan kultur; tetapi, bagaimana peranan perpustakaan, dalam menegakkan keadilan sosial, melawan penindasan dan neokolonialisme, guna mengembangkan kemandirian?

Paradigma baru tentang pembangunan, berupaya memahami peranan informasi dalam memajukan kemandirian, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan keotentikan kultural.

Seperti telah dibicarakan, gagasan-gagasan tentang kemandirian dan partisipasi masyarakat memiliki implikasi kebijaksanaan tertentu. Kesemuanya, misalnya, menuntut negara-negara berkembang untuk meninggalkan praktek alih teknologi, mengakhiri kebergantungan obat-obat impor, dan mengembangkan strategi komprehensif untuk mereduksi impor (khususnya, barang-barang mewah, dan kebergantungan pada perdagangan eksternal, pinjaman, dan investasi asing). Namun, kebijaksanaan dan strategi semacam itu menghadapi tantangan dari negara-negara industri. Dengan demikian, perebutan kekuasaan (*power struggle*) merupakan suatu aspek penting pembangunan yang bersifat mandiri. Kemandirian dan partisipasi masyarakat, juga mengarahkan cara-cara tradisional agar dapat berbuat dan mewujudkan. Masyarakat diberi peluang untuk "melakukan apa yang ingin dilakukannya sendiri", dengan cara berpikir dan bertindak tradisional, tetapi melalui rekonstruksi yang dapat memecahkan masalah-masalah modern. Pengobatan dan metode tradisional, misalnya, diperbaiki, dan dijadikan batu penjur untuk pembangunan pedesaan dan masyarakat. Hal ini memunculkan suatu

perbenturan nilai (*value struggle*) dalam pembangunan yang bersifat mandiri: memandang modernitas (secara tidak kritis) terlalu baik, dan melecehkan semua yang bersifat tradisional.

Kebijaksanaan untuk membangun masyarakat yang mandiri dan terlibat berpartisipasi, akan menimbulkan unsur-unsur perebutan kekuasaan dan perbenturan nilai. Arus informasi, yang memadai dan relevan, adalah penting dalam perebutan itu.

Jika kemandirian dan partisipasi masyarakat mencakup perebutan kekuasaan dan perbenturan nilai yang melibatkan faktor-faktor luar, maka keadilan sosial dan keotentikan kultural mencakup suatu perjuangan intern yang serupa. Strategi pembangunan, dalam rangka keotentikan kultural, juga mengambil bentuk perbenturan nilai: tradisi dan modernitas mencerminkan pandangan-pandangan dunia, ideologi, nilai-nilai dan norma-norma yang saling bertentangan. Pelestarian kultur tradisional, sebagian besar, melibatkan pelestarian nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Yang bersifat kultural di sebuah masyarakat berkembang itu sekaligus bersifat tradisional.

Keadilan sosial merupakan suatu konsep dialektikal. Ia meliputi baik tingkat makro (yaitu, organisasi sosial), maupun tingkat mikro (yaitu, pikiran manusia). Organisasi sosial di banyak negara berkembang, termasuk negeri-negeri Muslim, sebagian merupakan peninggalan masa lalu kolonial, dan sebagian merupakan hasil watak paternalistik dan hirarkis masyarakat tradisional. Kolonialisme menambah kelemahan dan mempertunjukkan ciri-ciri buruk kultur-kultur tradisional seraya menindas watak-watak kuat dan holistiknya.

Keadilan sosial dimulai dengan gagasan bahwa masyarakat dan berbagai kelompok di sebuah negara berkembang harus hidup satu sama lain, bukannya bertentangan, dan mengarahkan pendistribusian yang relatif adil atas kekayaan dan peluang sosial. Selanjutnya, harus mengarah ke pelestarian apa yang baik dan holistik, dalam pemikiran, organisasi tradisional, tatanan hukum, ekonomi, dan politik; untuk pendistribusian secara adil kekayaan dan peluang sosial, penghilangan

kecurigaan kelompok-kelompok sosial, pemajuan potensi manusia, penggalakan komunikasi antarindividu, dan penghilangan komunikasi linier-vertikal dan kritik yang merusak. Se jauh keadilan sosial menuntut penyebaran kekayaan, maka ia pun berurusan dengan politik. Sedangkan politik, sebagaimana kita tahu, berkenaan dengan kekuasaan.

Kebalikan dari keadilan sosial dan keotentikan kultural ialah alienasi (keterasingan). Alienasi, satu ciri masyarakat Dunia Ketiga dewasa ini, muncul akibat konflik antara tradisi dan modernitas, penindasan atas kultur dan pemikiran tradisional, kezaliman yang sedemikian akut (baik sosial maupun politik), buta huruf, despotisme, dan penindasan politik.

Menurut Woodward, empat kelompok informasi dapat diidentifikasi di negara-negara Dunia Ketiga:

1. Informasi Sainstifik dan Teknikal Formal (ISTF): informasi yang disimpan dalam berkala-berkala, buku-buku dan seri laporan utama dan diisyaratkan dalam jasa-jasa pengindeksan dan pengikhtisaran, kebanyakan yang dihasilkan di luar negara-negara berkembang.

2. Informasi impor: Informasi yang dibawa masuk ke negara berkembang sebagai hasil sampingan aktivitas lain tertentu, seperti program-program kerjasama teknikal atau aktivitas komersial/industrial, sebagian besar berbentuk keahlian yang diperoleh.

3. Informasi yang dihasilkan secara lokal : informasi yang dihasilkan sebagai hasil riset, studi, inventaris, proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan di negeri bersangkutan, kebanyakan ada dalam bentuk laporan atau format nonkonvensional.

4. Informasi sendiri : pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal, yang diperoleh dan disampaikan secara informal, biasanya melalui tradisi lisan. (Woodward, 1980).

Dengan demikian, sekarang ini, banyak informasi Dunia Ketiga berasal dari sumber-sumber luar: ISTF dan "informasi impor" membentuk bagian terbesar informasi, sedangkan informasi lokal tidak mudah dijangkau. Kebertumpuan, pada

sumber-sumber luar informasi, menyebabkan kebergantungan, dan bertentangan dengan strategi pembangunan yang bersifat mandiri.

Pada akhirnya, sumber-sumber internal informasi, di sebuah negara berkembang dan Dunia Ketiga, berkaitan dengan model pembangunan yang berorientasi kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebanyakan negara industri memiliki semua agen dan jasa informasi, dari mulai perpustakaan nasional, pusat dokumentasi nasional, sampai pusat-pusat informasi khusus, seperti: jasa dan jaringan informasi komputer, pusat-pusat data, jasa pengikhtisaran dan pengindeksan, perpustakaan-perpustakaan umum dan akademis, unit-unit informasi riset dan pembangunan, jasa-jasa informasi masyarakat, pusat-pusat informasi komersial, arsip-arsip, museum, berbagai penerbit dan penjual buku. Dapatkah kita berasumsi bahwa negara-negara berkembang juga membutuhkan jasa-jasa semacam ini? Haruskah model-model yang sekarang digunakan di Barat, juga digunakan di Dunia Ketiga?

Telah dikatakan bahwa informasi bertindak sebagai katalis bagi pembangunan dan perantara perubahan: ia dapat memajukan kemandirian dan partisipasi masyarakat, dan membawa suatu masyarakat ke arah keadilan sosial dan keotentikan kultural. Sebagai katalis sosial, agen-agen dan jasa-jasa informasi tidak memainkan suatu peranan yang tidak memihak kepada tujuan: pekerjaan mereka ialah menggerakkan perubahan, yang diinginkan dan membantu masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Mereka berurusan dengan penyebaran informasi pada tingkat individu dan masyarakat, serta dampak informasi pada individu, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan demikian, agen-agen dan jasa-jasa informasi di Dunia Ketiga mesti kritis pada model-model Barat: tidak beranggapan bahwa semua wilayah dan jasa yang ada di negara industri, sesuai untuk negara Dunia Ketiga, memenuhi pelbagai kebutuhan dan keperluan mereka. Agen-agen informasi tertentu, seperti perpustakaan nasional dan umum, harus ada di Dunia Ketiga, sedangkan lainnya harus dikembangkan dari berbagai kebutuhan dan keadaan-keadaan spesifik

mereka. Menurut Woodward, informasi sendiri ada dalam format-format nonkonvensional. Format-format ini harus dipelajari. Para agen informasi harus disesuaikan bentukannya, dan pengembangan cara-cara penyebarannya. Menggunakan kata-kata Benge, kebutuhan-kebutuhan spesifik harus diidentifikasi dan diterjemahkan ke dalam sistem-sistem sadar yang tidak perlu formal atau terorganisasi secara ketat.

Dengan kata lain, struktur informasi sebuah negara berkembang merupakan fungsi dari pelbagai kebutuhan pokoknya. Suatu analisis multidimensional, atas kebutuhan-kebutuhan pokok suatu negara, dapat memberikan petunjuk yang baik tentang struktur informasi yang hendak mencapai sasaran pembangunannya. Di lain pihak, suatu analisis, atas struktur informasi, akan menunjukkan tipe, kualitas dan kuantitas agen-agen informasi, dan saluran-saluran alih informasi, yang ada di suatu negara. Ia juga merupakan petunjuk tentang perebutan kekuasaan, dan nilai, yang terjadi di sebuah negara berkembang. Perbedaan, antara struktur informasi yang ada dan yang diperlukan, harus merupakan fokus kebijaksanaan informasi dari strategi pembangunan, yang berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan pokok. Dengan demikian, gagasan tentang struktur informasi telah berbicara banyak (baik tentang tingkat perkembangan sebuah negara maupun arah evolusinya) dalam mewujudkan sasaran pembangunan diri sendiri.

Struktur-struktur informasi dari banyak negara berkembang muncul secara agak sembarangan. Kalau bukan dari warisan kolonial, struktur-struktur itu merupakan hasil pelbagai tekanan dari luar. Hanya ada beberapa agen informasi di Dunia Ketiga yang muncul karena kebutuhan-kebutuhan nasional. Kebanyakan merupakan hasil tekanan dari luar, yang muncul dalam berbagai bentuk; "nasihat ahli", bantuan teknikal, keahlian berdagang (*salesmanship*), bantuan asing bersyarat, atau bentuk-bentuk langsung pemerasan politik yang brutal. Semua bentuk bantuan ini mengarahkan evolusi struktur-struktur informasi ke arah kebergantungan tertentu, katakanlah ke arah industrialisasi dan pemproduksi

barang-barang konsumen, bukannya pembangunan pertanian untuk mempertahankan hidup (*subsistence farming*), yang menopang tipe-tipe tertentu agen informasi (Sardar, 1977).

Beberapa agen informasi telah berkembang berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional. Negara-negara, dengan ekonomi tanaman pertanian dan pertambangan dan masalah-masalah kesehatan tertentu, telah mengembangkan agen-agen informasi khusus. Perpustakaan-perpustakaan umum tertentu telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan informasi dan hiburan. Begitu pula, pusat-pusat alih informasi nasional didirikan untuk memenuhi kebutuhan ilmuwan dan cendekiawan lokal. Tetapi, agen-agen informasi yang benar-benar mempribumi, relatif tidak banyak jumlahnya.

Namun demikian, model peranan informasi, dalam pembangunan kita, memerlukan evolusi tipe-tipe spesifik struktur informasi, yang dijalin dengan strategi kemandirian dan pembangunan diri. Watak struktur informasi, dan tipe-tipe agen informasi, akan bergantung pada posisi sebuah negara di dalam rangkaian kesatuan pembangunannya. Kita tidak dapat lagi memandang agen-agen informasi di negara berkembang secara umum. Fungsi, dan sasaran pembangunan mereka, harus didefinisikan dengan jelas. Pelbagai kebutuhan yang demikian berbeda, jarang sumber daya, kurangnya tenaga ahli, kultur yang berbeda dengan Eropa dan Amerika Utara: tidak memungkinkan adanya agen-agen informasi yang bercita-cita pustakawan Victoria, atau teknolog-teknolog informasi yang bersemangat. Dalam kebanyakan kasus, perlu dikembangkan bentuk-bentuk baru agen informasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga.

Mempertimbangkan evolusi struktur informasi di Dunia Ketiga, kita pun harus membedakan antara berbagai jenis informasi. Kita bisa menimbangannya dari informasi mutakhir, dalam suatu proses teknologi uang yang intensif, maju, cepat, dan hemat tenaga, dalam kegiatan produksi gelas besar-besaran. Lalu, membandingkannya dengan proses yang terjadi di tempat, seperti Dewan Pakistan: dalam kegiatan riset *sains* dan industri yang

membutuhkan banyak tenaga, teknologi, dan keahlian tingkat dasar, namun rendah produksinya. Dengan kata lain, kita harus memutuskan informasi yang lebih relevan dengan sebuah negara berkembang tertentu.

Relevan atau tidaknya informasi bagi suatu negara berkembang, ditentukan rujukan wilayah kebutuhan-kebutuhan pokok suatu negara. Tidak boleh dilupakan, wilayah ini juga menggambarkan lingkungan kultural, sosial, dan fisikal, sebuah negara Dunia Ketiga. Dengan demikian, relevan dan tidaknya informasi, ditentukan bukan saja oleh kebutuhan-kebutuhan pokok, tetapi juga oleh faktor-faktor penentu kultural, sosial, dan fisikal. Bagi negara berkembang, katakanlah Malaysia, yang tahap rangkaian pembangunannya telah memenuhi pelbagai kebutuhan pokok kebanyakan masyarakatnya, dan tingkat kemandirian basis riset dan teknologi pun telah tercapai, maka informasi dari lembaga riset negara industri akan bisa lebih sesuai. Namun demikian, hal ini merupakan fenomena yang jarang. Namun bagi negara lain, yang berbeda tahap rangkaian kesatuan pembangunannya (di mana kebanyakan kebutuhan pokok masih harus dipenuhi, dan kemandirian pun masih jauh), maka informasi yang

dihasilkan di Pakistan akan lebih sesuai. Berdasarkan keadaan sekarang, kebanyakan negara berkembang, memiliki kesesuaian dalam hasil informasinya. Namun, ketika masing-masing negara berkembang bergerak ke arah sasaran kemandirian, relevansi dan tidak relevannya informasi tertentu ditentukan oleh tingkat kebutuhan-kebutuhan pokok mereka.

Halangan utama pendekatan pembangunan, yang berorientasi kebutuhan-kebutuhan pokok, ialah pandangan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang pada umumnya, dan negeri-negeri Muslim khususnya, tentang diri mereka sendiri dan negara-negara industri. Pada tahap tertentu, pandangan ini merupakan suatu warisan kolonialisme. Namun, hal ini juga merupakan hasil pola-pola pembangunan konvensional yang telah dilakukan masyarakat di negara berkembang. Analisis atas peranan informasi ini, harus dikembangkan dengan suatu pendekatan yang kritis dan seimbang. Akhirnya, hanya dengan mengembangkan teknologi-teknologi informasi yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan dan kriteria nilai yang khas-lah, negeri-negeri Muslim akan dapat bertahan dengan integritas dan kemandiriannya di abad informasi. ●